

Perekonomian Indonesia
Meredam Gejolak dan Mengejar Target
Catatan atas Isu Kontemporer Perekonomian
Indonesia dan Kebijakan



Prof. Dr. Mansur Afifi



AKSARA CITA
PUSTAKA
POWERED BY IKLIL & BILDIS

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perekonomian Indonesia
Meredam Gejolak dan Mengejar Target
Catatan atas Isu Kontemporer Perekonomian
Indonesia dan Kebijakan

Prof. Dr. Mansur Afifi



Perekonomian Indonesia
Meredam Gejolak dan Mengejar Target
Catatan atas Isu Kontemporer Perekonomian Indonesia dan
Kebijakan

©2025 Aksara Cita Pustaka

Penulis : Prof. Dr. Mansur Afifi
Editor : Afif Athaullah Pranaja
Tata Letak : Iklil Abiyyu Zhafran, A.Md.A.B.
Desain Cover : Daffa' Putri Dzakiyyah Rachma

ISBN: 978-623-10-8742-3
246 hlm.; 17,6 cm x 25 cm

Diterbitkan oleh
CV Aksara Cita Pustaka
aksaracitapustaka@gmail.com
www.aksaracitapustaka.com



PROPERTY OF

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Dinamika dalam perekonomian global, nasional, dan regional menghiasi berbagai kolom-kolom opini dari media masa dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai peristiwa di dunia seperti konflik bersenjata antar bangsa, pandemi, dan perubahan kebijakan arus utama (*mainstream policy*) akibat suksesi pemerintah di berbagai negara mempengaruhi dinamika dan konjungtur besaran (variabel) ekonomi utama di dunia. Perubahan-perubahan tersebut tidak jarang menyebabkan pelemahan ekonomi dan sering kali berujung pada krisis ekonomi dan meninggalkan dampak berkepanjangan (*scarring effect*). Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi pemicu kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan tujuan mengendalikan situasi dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap perekonomian Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut menjadi isu yang populer dan menarik perhatian penulis untuk merekam, mengkritisi, dan memberikan *respons* serta rekomendasi dari perspektif yang sesuai dengan latar belakang penulis sebagai seorang akademisi. Selama kurun waktu kurang dari satu dasa warsa, penulis mengamati berbagai peristiwa yang terjadi beserta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan dalam perekonomian Indonesia. Tanggapan atau opini atas isu tersebut penulis tulis dan publikasikan pada berbagai media masa baik di level nasional maupun regional.



Tulisan yang tersebar pada berbagai media masa tersebut penulis kumpulkan dan kini tersaji dalam buku ini. Mengingat artikel tersebut ditulis dalam kurun waktu yang relatif panjang maka buku ini menjadi catatan atas peristiwa masa lalu berserta analisis atas peristiwa yang terjadi. Karena itu, buku ini selain menyajikan kajian dan analisis terhadap isu-isu tersebut juga dapat dipandang sebagai catatan sejarah perekonomian Indonesia di masa lalu. Buku ini tidak disusun berdasarkan perspektif waktu melainkan sesuai dengan topik atau isu karena buku ini tidak dimaksudkan untuk mencatat peristiwa demi peristiwa menurut kronologi waktu.

Artikel dalam buku ini ditulis dalam kurun waktu yang panjang dan dipublikasikan di berbagai media masa dan forum sehingga tidak dapat dihindari jika terjadi pengulangan gagasan dan usulan dalam keseluruhan isi buku ini. Hal ini tidak menjadi kelemahan atau kekurangan dari buku ini tetapi justru menjadi pengingat bagi pembaca karena isu-isu tersebut diungkap secara intens. Sebagaimana sering diungkap oleh para sejarawan bahwa peristiwa di masa lalu sering kali terulang di masa kini dan kemungkinan besar berpeluang terjadi di masa depan. Karena itu, kita diingatkan oleh mereka agar belajar dari masa lalu sehingga dapat memetik pelajaran atau hikmah untuk mengantisipasi peristiwa serupa yang kemungkinan terjadi dimasa kita hidup.

Buku ini ditujukan untuk para pembuat kebijakan ekonomi, serta bagi mereka yang tertarik dengan isu-isu perekonomian Indonesia dan mengamati berbagai kebijakan ekonomi yang dihajatkan dalam konteks perekonomian Indonesia. Selain itu, buku

ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah perekonomian Indonesia, ekonomi pembangunan, ekonomi perencanaan, ekonomi publik, perencanaan pembangunan daerah, dan keuangan daerah.

Sebagai penutup, berbagai isu dan kebijakan yang dibahas dalam buku ini merupakan upaya untuk berkontribusi dalam memikirkan masalah yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, buku ini tidaklah sempurna, dan penulis dengan sepenuh hati menerima saran dan kritik untuk memperbaiki karya sederhana ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	6
BAB 1 Meredam Gejolak, Mengejar Target	8
BAB 2 Menguji Pertumbuhan Ekonomi	13
BAB 3 Menakar Kenaikan Bunga Acuan	18
BAB 4 Membuat Terang Rupiah Digital	23
BAB 5 Uang Digital dan Kedaulatan Moneter.....	28
BAB 6 Meneropong Prospek Pariwisata Nasional	34
BAB 7 Memperkuat Momentum Pemulihan Pariwisata	40
BAB 8 Industrialisasi dan Hilirisasi SDA.....	46
BAB 9 Reviu atas Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 ..	51
BAB 10 Bersiap Menghadapi Krisis	56
BAB 11 Membiayai Defisit APBN	60
BAB 12 Mengokohkan Ekosistem Halal.....	65
BAB 13 Ekonomi Rakyat Menuju Resesi.....	71
BAB 14 Mencermati Pelemahan Rupiah	76
BAB 15 Entas Kemiskinan Perdesaan	80
BAB 16 Mencermati Distribusi Subsidi Pupuk	84
BAB 17 RAPBN 2016 yang Pro Daerah	89
BAB 18 Alokasi Anggaran dan Pertumbuhan	94
BAB 19 Menekan Permintaan Rokok	99
BAB 20 Memotret Paket Kebijakan Ekonomi	103
BAB 21 Analisis Atas Belanja Perpajakan.....	108
BAB 22 Mewujudkan Kedaulatan Pangan	119

	Halaman
BAB 23 QRIS dan Pembayaran Digital	124
BAB 24 Pengelolaan APBN di Daerah	128
BAB 25 Menakar Kebijakan Pemulihan Ekonomi	133
BAB 26 Menurunkan Angka Kemiskinan	138
BAB 27 Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.....	143
BAB 28 Membangun Optimisme di Tengah Gejolak	148
BAB 29 Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Desa	153
BAB 30 Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan	158
BAB 31 Optimisme Membangun Daerah	162
BAB 32 Peran APBN dalam Perekonomian Daerah	170
BAB 33 Mengelola Utang Publik	182
BAB 34 Merevitalisasi Kearifan Lokal untuk Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam	191
BAB 35 Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas	209
Referensi	236
Tentang Penulis	242

Meredam Gejolak, Mengejar Target

Kebijakan kenaikan suku bunga acuan (BI *7-Day Reverse Repo Rate*) yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) pada Rapat Dewan Gubernur 21-22 September 2022 cukup mengejutkan. Kenaikan sebesar 50 bps dianggap terlalu agresif karena selama ini suku bunga acuan dinaikkan secara bertahap. Selain itu, sebulan yang lalu BI telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps. Jadi, dalam dua bulan bunga acuan meningkat sebesar 75 bps sehingga suku bunga acuan menjadi 4,25%.

Dalam waktu yang hampir bersamaan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) juga menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 bps. Kenaikan ini sudah diprediksikan oleh banyak pihak mengingat kondisi inflasi di AS yang cukup tinggi. Pada Juni 2022 ketika bunga acuan berada di level 1,75%, inflasi tahunan di AS mencapai 9,1% yang merupakan rekor tertinggi inflasi selama 4 dekade. Kemudian pada Juli 2022, suku bunga acuan dinaikkan menjadi 2,5% dan inflasi dapat ditekan menjadi 8,5%.

Meskipun pada Agustus 2022 inflasi kembali turun menjadi 8,3%, tetapi angka tersebut masih dianggap tinggi. Lalu pada 21 September 2022, Bank Sentral AS kembali menaikkan suku bunga acuannya sehingga *the Fed Fund Rate* menjadi 3,5%. Prediksi akan adanya kenaikan *the Fed Fund Rate* ini yang menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan suku bunga acuan BI. Jika Indonesia tidak

menaikkan suku bunga acuan, dikhawatirkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri yang masif (*capital flight*).

Faktor berikutnya yang mendorong kenaikan bunga acuan BI adalah ekspektasi kenaikan inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga

BBM pada awal September 2022. Ekspektasi itu terbukti ketika Badan Pusat Statistik pada 3 Oktober 2022 melaporkan tingkat inflasi pada September 2022 sebesar 5,95%. Angka inflasi ini lebih tinggi dari tingkat inflasi pada bulan sebelumnya yaitu sebesar 4,69%.

Selain itu, melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar AS yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir turut mendorong BI menaikkan suku bunga acuan. Kurs rupiah terhadap dolar AS pada 1 Agustus 2022 berada pada level Rp 14.872,50 per dolar AS kemudian meningkat menjadi Rp 14.883 per dolar AS pada 1 September 2022. Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS terus berlanjut sehingga pada 3 Oktober 2022, rupiah berada pada angka Rp 15.227,50 per dolar AS, melewati level psikologisnya sebesar Rp 15.000 per dolar AS.

Antisipasi Dampak

Kebijakan menaikkan suku bunga acuan di samping sebagai upaya meredam gejolak, juga langkah antisipasi dengan mendahului menaikkan suku bunga dan mencegah dampak negatif perkembangan ekonomi global di masa depan (*front loaded, preemptive, dan forward looking*). Ini dilakukan terutama untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali



ke sasaran 3,0+/-1% pada paruh kedua 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi kurs rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tidak bisa membebaskan diri dari pengaruh perekonomian dunia yang dinamis dan sarat dengan berbagai persoalan. Dalam terminologi ekonomi, kebijakan ini disebut sebagai *counter-cyclical policy* yaitu kebijakan moneter yang bertujuan menekan laju perkembangan variabel ekonomi yang sedang menuju titik ekstrim. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pemerintah sebelumnya telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%-5,3% dan pertumbuhan kredit sebesar 9%-11% pada 2022.

Meskipun demikian, banyak pengamat mengkhawatirkan bahwa kenaikan suku bunga acuan akan berdampak pada menurunnya likuiditas sehingga menekan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh hasrat berinvestasi yang menurun akibat dari meningkatnya suku bunga kredit. Selanjutnya produksi dan produktivitas nasional menurun, pengangguran meningkat, pendapatan berkurang, dan daya beli tertekan.

Meskipun kekhawatiran tersebut cukup rasional, tetapi hal itu tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Kebijakan kenaikan suku bunga acuan berdimensi jangka menengah di mana bank-bank membutuhkan waktu penyesuaian suku bunga simpanan dan kredit dalam kurun 1-2 kuartal. Selain itu, sejak Juni 2022 hingga Agustus

2022 suku bunga kredit rata-rata tertimbang adalah sebesar 8,94%, lebih kecil dari angka Mei 2022 sebesar 9,01%.

Selain itu, likuiditas perbankan juga masih longgar di mana Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di atas *threshold* (ambang batas). Pada Agustus 2022, AL/NCD berada pada angka 118,01 persen sementara AL/DPK sebesar 26,52 persen, jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) sebesar 81,22%, bank-bank tidak hanya leluasa menyalurkan kredit/pembiayaan, tetapi juga membeli surat berharga negara (SBN).

Pertumbuhan kredit baik UMKM maupun non UMKM telah menunjukkan pemulihan sejak awal 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi. Jika pada Agustus 2021 kredit tumbuh sebesar 1,16% (YoY), maka pada Agustus 2022 meningkat menjadi 10,62% (YoY). Sejak Desember 2021, pertumbuhan kredit UMKM selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata kredit dan pada Agustus 2022 bahkan mencapai 16,77%. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga acuan akan menyebabkan perlambatan hingga kontraksi perekonomian dalam jangka pendek dapat ditepis.

Persoalan yang masih mengganjal saat ini adalah seberapa cepat inflasi yang terus meningkat dan kurs rupiah yang terus terdepresiasi ini dapat diredam dengan kebijakan menaikkan suku bunga. Meskipun BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps sebulan yang lalu, tetapi kurs rupiah masih terus melemah dan laju inflasi terus melambung.



Fakta ini menggambarkan bahwa kebijakan moneter semata tidak akan mungkin dapat mengendalikan sepenuhnya kedua variabel tersebut. Sebab sebagian dari faktor yang mempengaruhi pergerakan (konjungtur) kedua variabel tersebut berada di luar rentang kendali (*span of control*) kebijakan moneter. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus diselaraskan dengan kebijakan lainnya (fiskal) agar upaya meredam gejolak dan menstabilkan perekonomian berhasil dilakukan secara efektif dan efisien.

Meskipun demikian, kebijakan suku bunga tetap harus dinamis, terukur, dan mampu menstimulasi perekonomian agar sektor riil dapat bergerak. Ibarat rem dan gas, menaikkan dan menurunkan suku bunga harus dilakukan agar stabilitas ekonomi terjaga sehingga target pertumbuhan ekonomi tercapai. Selain itu, tujuan perekonomian yang sejatinya adalah menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial dapat diwujudkan.

Dipublikasikan di: detik.com, Senin, 17 Oktober 2022.

Menguji Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengejutkan tumbuh positif sepanjang tiga kuartal terakhir pada 2022. Pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02% kemudian naik menjadi 5,46% pada kuartal kedua dan 5,72% pada kuartal ketiga. Keterkejutan itu dipicu oleh berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan situasi perekonomian domestik dan global yang tidak dalam keadaan baik-baik saja.

Isu ini mencuat di acara "*Flagship* Diseminasi Laporan Nusantara serta *Launching* Buku Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia dan Pariwisata" di Nusa Dua Bali pada 18 November 2022. Ada beberapa fakta yang menyebabkan mengapa angka pertumbuhan ekonomi tersebut harus diuji.

Pertama, tren pertumbuhan ekonomi global menuju penghujung 2022 makin melemah dan diperburuk dengan tekanan inflasi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS), kawasan Eropa, dan Jepang diperkirakan makin melemah hingga 2023 dengan risiko mengalami resesi. Hal ini dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik yang terus berlanjut sehingga menimbulkan fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Selain itu, kebijakan moneter yang ketat turut memperburuk kinerja perekonomian secara keseluruhan. Hal ini tentu memberi dampak pada arus ekspor Indonesia ke pasar global.

Kedua, inflasi global cenderung semakin meningkat seiring dengan gangguan rantai pasokan dan kesempatan kerja yang masih terbatas terutama di AS dan Eropa. Tren kenaikan inflasi tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang.

Kondisi ini menyebabkan bank sentral di banyak negara menaikkan suku bunga acuan. Bank Sentral AS secara terus menerus menaikkan suku bunga acuan, *Fed Fund Rate*, sehingga menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kebijakan tersebut mendorong terjadinya arus modal keluar (*capital flight*) dan tekanan nilai tukar mata uang dari berbagai negara.

Ketiga, tingkat inflasi masih relatif tinggi dan terus meningkat di seluruh wilayah di Tanah Air. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) mencapai 5,95% secara tahunan (YoY) pada triwulan III - 2022 yang berarti terjadi peningkatan dari triwulan II - 2022 yang berada di level 4,35% (YoY). Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat dan menjadi disinsentif untuk berinvestasi.

Keempat, sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung makin melemah dan berada di level Rp15.622,50 per dolar AS pada penutupan pasar 17 November 2022. Melemahnya nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya produksi barang yang mengandung komponen impor.

Kelima, hingga September 2022 realisasi belanja negara baru mencapai 61,6% atau Rp1.913,9 triliun dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun. Serapan belanja yang rendah dapat mengurangi efektivitas APBN dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Keenam, kenaikan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang dilakukan secara berturut-turut selama empat bulan menyebabkan suku bunga acuan meningkat sebesar 1,75% yaitu dari 3,5% pada Juli 2022 hingga menjadi 5,25% pada November. Kenaikan suku bunga acuan menyebabkan kenaikan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit meskipun tidak secara simultan. Konsekuensinya, tingkat investasi menurun, produksi dan produktivitas stagnan jika tidak melambat.

Sumber Pertumbuhan

Meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan, perekonomian nasional menunjukkan perbaikan yang signifikan. Sumber utama pertumbuhan selama tiga triwulan terakhir adalah dari membaiknya permintaan domestik yang disokong oleh konsumsi swasta yang tinggi, investasi yang tetap positif, dan ekspor yang terus bertumbuh.

Membaiknya mobilitas, berkembangnya aktivitas ekonomi, dan kuatnya keyakinan konsumen menyebabkan kegiatan produksi terus bertumbuh. Meskipun dibayangi dengan kenaikan harga, kinerja lapangan usaha meningkat seperti batu bara, CPO, besi, dan baja seiring dengan peningkatan permintaan dari mitra dagang utama.

Kebijakan stimulus pemerintah dengan memberikan bantuan sosial menyebabkan daya beli masyarakat dapat dipertahankan di tengah kenaikan inflasi akibat pengalihan subsidi BBM. Selain itu, bauran kebijakan yang diambil Bank Indonesia dan koordinasi yang dilakukan mitra strategis dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah dan

Pusat (TPID dan TPIP) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berhasil mengerem laju inflasi dan mengendalikan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM.

Meskipun demikian perlu diwaspadai bahwa dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga pinjaman hingga triwulan III belum signifikan. Kenaikan suku bunga pinjaman akan naik signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, mitigasi atas kenaikan suku bunga pinjaman melalui operasi moneter perlu dilakukan secara terukur, *prudent*, dan berkelanjutan.

Kenaikan suku bunga pinjaman semakin membebani pengusaha karena biaya modal yang bertambah dan di saat yang sama harga input produksi dan energi juga meningkat. Untuk itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu memberikan insentif bereproduksi melalui pengurangan pungutan dan keringanan pajak bagi para pelaku industri. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah.

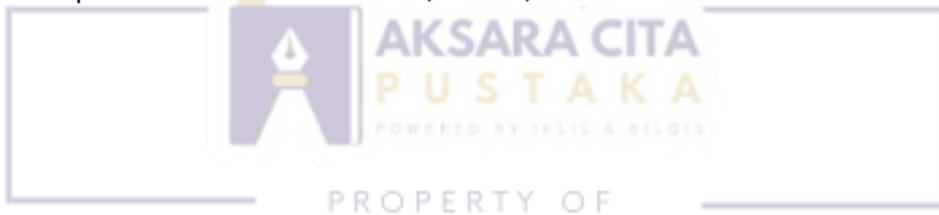
Selain itu, kondisi ekonomi global yang masih bergejolak dapat menekan laju ekspor komoditas primer Indonesia. Oleh karena itu, ide atau keinginan pemerintah untuk hilirisasi sumber daya alam (SDA) mentah produk pertambangan dan pertanian perlu segera diimplementasikan. Hilirisasi SDA tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah komoditas tetapi juga menciptakan kesempatan kerja dan transfer teknologi.

Untuk mempertahankan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat yang tergerus oleh kenaikan harga, pemerintah perlu

meluncurkan program *social safety net* (jaring pengaman sosial) seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi upah. Kebijakan ini tidak hanya dapat menjadi insentif berproduksi bagi pelaku industri/usaha, tetapi juga menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga kegiatan usaha masyarakat terus berkembang dan kesempatan kerja tetap tercipta.

Meskipun perekonomian global masih bergejolak, harapan pertumbuhan ekonomi domestik yang positif tetap, ada jika kita berfokus menyelesaikan persoalan ekonomi dalam negeri dengan cerdas dan cermat. Semoga!

Dipublikasikan di: detik.com, Kamis, 24 November 2022.



Menakar Kenaikan Bunga Acuan

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) pada Rapat Dewan Gubernur 21-22 September 2022 sehingga menjadi 4,25%. Kenaikan ini mengejutkan karena sebulan yang lalu BI juga telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps. Kenaikan itu menandai berakhirnya era suku bunga rendah yang sempat bertahan selama 19 bulan.

Selain itu, kenaikan sebesar 50 bps dianggap cukup agresif karena biasanya suku bunga acuan dinaikkan secara bertahap. Pada saat yang hampir bersamaan, bank sentral Amerika (*The Federal Reserve Bank*) memutuskan kenaikan suku bunga acuan *Fed Fund Rate* sebesar 75 basis poin sehingga menjadi 3,25 persen.

Pada galibnya, kebijakan menaikkan suku bunga acuan dilakukan setelah memperhatikan pergerakan (konjungtur) variabel makro ekonomi utama yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut terutama inflasi dan nilai tukar rupiah. Kedua variabel tersebut secara teoritis dapat dikendalikan dengan menggunakan instrumen suku bunga. Tentu saja dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Kenaikan suku bunga acuan yang agresif pada September 2022 tidak terlepas dari tren inflasi yang masih tinggi pada Agustus 2022 yang mencapai 4,69% secara tahunan (YoY). Angka ini melebihi batas atas target inflasi yang ditetapkan BI yang berkisar 2%-4%. Meskipun angka inflasi ini lebih rendah dari angka pada Juli 2022 yang